

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian tentang pertumbuhan ekonomi regional dengan analisis penyaluran dana ZIS, investasi asing, pembiayaan mikro Syariah, *P2P lending* dan indeks harga konsumen dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis deskriptif variabel berdasarkan temuan penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi Regional (PDRB)

Berdasarkan analisis deskriptif selama periode 2019–2023, tren pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat secara umum, meskipun dengan variasi antar wilayah yang cukup mencolok. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat secara konsisten mencatatkan PDRB tinggi berkat infrastruktur ekonomi yang mapan. Sementara wilayah timur seperti Papua dan Maluku mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, cerminan dari keterbatasan akses dan ketergantungan pada sektor primer. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata.

- b. Penyaluran Dana ZIS

Penyaluran dana ZIS menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Daerah-daerah dengan kapasitas kelembagaan zakat yang kuat, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, mengalami lonjakan penyaluran dana ZIS. Distribusi ZIS masih didominasi oleh wilayah barat Indonesia, sementara wilayah timur menunjukkan nilai penyaluran yang jauh lebih rendah. Ini mengindikasikan bahwa potensi ZIS belum sepenuhnya dimanfaatkan secara merata sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal.

- c. Investasi Asing

Investasi asing menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif tinggi, namun terkonsentrasi di wilayah-wilayah industri besar seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta. Penyaluran FDI ke wilayah timur masih sangat terbatas, yang menunjukkan bahwa daya tarik investasi belum tersebar merata ke seluruh provinsi. Ini mencerminkan ketimpangan kesiapan infrastruktur dan ekosistem usaha antarwilayah.

d. Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro Syariah mengalami lonjakan penyaluran yang sangat tajam, khususnya sejak 2020. Provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat mendominasi, didukung oleh literasi digital dan kepadatan pelaku usaha mikro. Namun, wilayah 3T masih belum terjangkau secara optimal. Ini menandakan bahwa pemerataan akses pembiayaan berbasis digital masih perlu ditingkatkan.

e. *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*

Penyaluran pinjaman melalui *P2P lending* meningkat signifikan sejak 2020. Hal ini dipengaruhi oleh percepatan digitalisasi layanan keuangan dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan UMKM di masa pandemi. Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta menjadi daerah dengan volume penyaluran tertinggi karena didukung oleh ekosistem *fintech* yang kuat, literasi digital yang tinggi, serta konsentrasi UMKM yang besar. Sebaliknya, daerah seperti Sulawesi Barat dan Maluku Utara mencatat penyaluran sangat rendah akibat keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi.

f. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks harga konsumen secara nasional berada dalam tren inflasi yang moderat dan terkendali. Wilayah barat relatif stabil karena efisiensi distribusi dan infrastruktur logistik, sementara wilayah timur mengalami fluktuasi yang lebih tinggi akibat biaya logistik yang mahal dan keterbatasan pasokan. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi dalam distribusi dan logistik antarwilayah.

2. Penyaluran dana ZIS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan

alokasi dana zakat, infak, dan sedekah mampu mendorong konsumsi masyarakat serta mendukung program-program pemberdayaan ekonomi. Dana ZIS yang disalurkan secara produktif, seperti modal usaha mikro dan pelatihan keterampilan, telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat aktivitas ekonomi lokal dan meningkatkan output daerah.

3. Investasi asing juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Arus modal dari luar negeri memberikan kontribusi terhadap perluasan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan efisiensi sektor industri. Wilayah yang mampu menarik investasi asing dalam jumlah besar cenderung mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi, terutama jika investasi tersebut disertai dengan transfer teknologi dan integrasi pasar.
4. Pembiayaan mikro syariah tidak menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Keterbatasan dampak ini disebabkan oleh masih kecilnya skala pembiayaan yang disalurkan, serta belum meratanya jangkauan layanan perbankan syariah di berbagai wilayah.
5. *P2P lending* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Pembiayaan berbasis digital ini telah menjadi alternatif yang efektif dalam memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM yang tidak terlayani oleh sektor perbankan formal. Dengan kemudahan dan kecepatan prosesnya, *P2P lending* mampu mendorong peningkatan produktivitas dan konsumsi masyarakat secara langsung, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.
6. Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Inflasi yang terjaga dalam kisaran moderat mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama PDRB. Stabilitas harga memberi kepastian bagi pelaku usaha dan menjaga daya beli masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat kinerja sektor riil di berbagai daerah.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

5.2.1 Implikasi Teoretis

Hasil penelitian ini memperkuat relevansi teori pertumbuhan endogen, yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat didorong oleh faktor-faktor internal seperti akumulasi modal, modal manusia, dan inovasi teknologi. Dalam konteks ini, penyaluran dana ZIS sebagai bentuk modal sosial terbukti mampu meningkatkan konsumsi serta produktivitas masyarakat, khususnya melalui program pemberdayaan. Investasi asing berperan sebagai pendorong kapasitas produksi daerah dan menjadi saluran penting bagi transfer teknologi. Sementara itu, kehadiran *P2P lending* memperluas akses pembiayaan usaha berbasis teknologi, yang menjadi bentuk inovasi keuangan yang mendorong pertumbuhan dari sisi inklusi keuangan. Stabilitas inflasi yang tercermin dalam nilai IHK yang moderat juga mendukung permintaan agregat yang sehat, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, pembiayaan mikro syariah yang tidak menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional menandakan bahwa kontribusi jenis pembiayaan ini belum mencapai ambang batas efektif untuk menghasilkan dampak makroekonomi. Kondisi ini membuka ruang untuk penyempurnaan pendekatan dalam *threshold hypothesis*, khususnya dalam memahami sejauh mana tingkat minimum pembiayaan diperlukan agar dapat memicu perubahan terhadap output ekonomi.

5.2.2 Implikasi Praktis

Hasil temuan dalam penelitian ini dapat memberikan implikasi nyata terhadap pengelolaan kebijakan keuangan dan pembangunan ekonomi daerah. Setiap variabel yang diteliti menunjukkan hubungan yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi regional, dan hal ini mencerminkan bahwa pendekatan kebijakan harus disesuaikan dengan karakteristik dan efektivitas masing-masing instrumen.

1. Dana ZIS yang disalurkan secara produktif terbukti memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dana sosial

Islam bukan hanya instrumen kesejahteraan sosial, tetapi juga mampu menggerakkan konsumsi dan aktivitas ekonomi mustahik. Namun, distribusi dana ZIS selama ini belum merata antarwilayah, sebagian besar penyaluran masih terpusat di daerah dengan kapasitas kelembagaan zakat yang kuat. Ketimpangan ini menghambat potensi optimal ZIS dalam memperkuat perekonomian lokal di wilayah-wilayah tertinggal. Dengan demikian, pendistribusian ZIS harus lebih diarahkan secara geografis agar efeknya tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan atau daerah maju.

2. Investasi asing menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, menandakan bahwa investasi asing tetap menjadi motor penting dalam meningkatkan kapasitas produksi, menyerap tenaga kerja, dan mentransfer teknologi. Namun demikian, konsentrasi investasi asing masih didominasi oleh wilayah industri besar seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta. Akibatnya, ketimpangan arus investasi akan memperlebar jurang pertumbuhan antarwilayah. Oleh karena itu, daerah-daerah dengan potensi ekonomi yang belum tergarap perlu memperkuat iklim investasi lokal agar dapat memperoleh manfaat dari investasi asing secara lebih merata.
3. Pembiayaan mikro syariah tidak menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Akar persoalannya adalah jumlah pembiayaan yang masih relatif kecil dan belum tersebar luas, sehingga kontribusinya terhadap PDRB tidak cukup besar. Skala yang terbatas ini terutama terjadi di daerah dengan akses terbatas terhadap perbankan syariah. Hal ini menandakan bahwa peningkatan nominal pembiayaan perlu menjadi fokus utama. Namun demikian, besarnya pembiayaan tidak akan berdampak maksimal tanpa disertai dukungan seperti pelatihan usaha, pendampingan berkelanjutan, dan penguatan literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM.
4. *P2P lending* terbukti berpengaruh signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional, menunjukkan bahwa inovasi keuangan digital memiliki potensi besar dalam memperluas akses pembiayaan, khususnya di luar sistem perbankan formal. Model ini sangat membantu pelaku usaha kecil dan menengah yang sebelumnya sulit mendapatkan pinjaman. Namun, penetrasi

P2P lending masih lebih kuat di kota besar, dan belum menjangkau daerah tertinggal secara optimal. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah memastikan ekosistem *fintech lending* yang aman, teratur, dan merata agar dapat menjangkau seluruh wilayah tanpa memunculkan risiko baru seperti pinjaman ilegal.

5. Indeks harga konsumen sebagai indikator inflasi dalam keadaan stabil memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi inflasi moderat yang tercermin melalui pergerakan IHK, konsumsi akan tetap tumbuh dan aktivitas ekonomi bergerak lebih stabil. Namun, perbedaan laju IHK juga mencerminkan adanya ketimpangan harga antarwilayah, khususnya di Indonesia bagian timur, di mana biaya logistik tinggi dan pasokan barang terbatas. Ini menjadi sinyal bahwa pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan di tingkat nasional, melainkan juga perlu berbasis wilayah dengan memperhatikan efisiensi distribusi dan ketersediaan pasokan di daerah terpencil.

5.3 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat
 - a. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman bahwa dana ZIS dan pembiayaan digital seperti *P2P lending* bukan hanya sebagai bantuan atau pinjaman konsumtif, melainkan peluang ekonomi untuk memulai atau mengembangkan usaha produktif. Program-program pemberdayaan yang berbasis komunitas dapat dimaksimalkan melalui partisipasi aktif dan pelatihan yang disediakan.
 - b. Masyarakat juga perlu memahami risiko dan mekanisme pembiayaan digital agar tidak terjebak dalam utang yang tidak produktif, serta mampu membangun kesadaran literasi keuangan secara mandiri atau melalui forum komunitas ekonomi lokal.

2. Bagi Pemerintah dan Regulator

- a. BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu memperluas distribusi zakat produktif ke wilayah yang belum optimal terjangkau, terutama daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan minim akses pembiayaan formal, agar manfaat zakat lebih merata dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal.
- b. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) disarankan memperkuat promosi dan fasilitasi investasi asing di luar Pulau Jawa melalui pemetaan potensi investasi daerah serta kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur dan perizinan sehingga dapat membuka peluang besar bagi investor untuk berinvestasi di luar pulau Jawa.
- c. Otoritas jasa keuangan perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik *P2P lending* agar berjalan sesuai prinsip perlindungan konsumen dan mendukung inklusi keuangan, khususnya di daerah yang belum terlayani oleh sistem keuangan formal.
- d. Perbankan syariah perlu memperluas pembiayaan mikro ke wilayah-wilayah yang kurang terjangkau, dan memastikan bahwa pembiayaan disertai dengan pendampingan usaha serta pelatihan kewirausahaan agar dampaknya lebih berkelanjutan.
- e. Pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam membangun sinergi antara bank syariah, lembaga zakat daerah, dan pelaku UMKM. Dukungan dapat dilakukan melalui kebijakan daerah yang mendukung, penyediaan data UMKM yang akurat, dan lain sebagainya.
- f. Bank Indonesia perlu terus memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi berbasis wilayah, termasuk mendukung kebijakan peningkatan sistem logistik dan distribusi barang pokok guna menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan studi-studi lanjutan yang mengkaji hubungan antara instrumen keuangan dan

pertumbuhan ekonomi daerah. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel makroekonomi lain yang relevan dan tersedia secara sekunder, seperti tingkat pengangguran, kemiskinan, atau rasio kredit UMKM terhadap PDRB, guna memperluas cakupan model dan meningkatkan ketajaman analisis. Selain itu, penelliti selanjutnya dapat menggunakan indikator PDRB perkapita dengan tujuan menangkap dimensi kesejahteraan ekonomi secara lebih proporsional terhadap jumlah penduduk di setiap daerah. Disamping itu,, penggunaan indikator laju pertumbuhan ekonomi juga dapat dipertimbangkan agar mampu mereflesikan perubahan dinamika ekonomi antar waktu secara lebih jelas. Degan demikian, hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan pemerataan ekonomi antar wilayah baik dari sisi total ouput ekonomi maupun kualitasnya terhadap populasi.

- b. Peneliti selanjutnya juga disarankan menggunakan pendekatan *threshold hypothesis* untuk mencari tahu batas minimal pembiayaan mikro syariah yang benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, dapat ditentukan kebijakan pembiayaan yang tepat, terutama bagi daerah dengan akses ke perbankan syariah yang masih terbatas.
- c. Pengembangan penelitian ini dapat diarahkan dengan membandingkan seberapa besar pengaruh instrumen keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di antarprovinsi dengan karakteristik berbeda. Misalnya, antara provinsi yang memiliki tingkat pembangunan ekonomi tinggi dan rendah, atau antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Pendekatan ini akan membantu memahami perbedaan efektivitas kebijakan keuangan di setiap daerah.